

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Peneliti dalam bab ini akan memberikan simpulan tentang hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya. Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai Political Timing : Analisis Politik Kebijakan Sosial ( BLT dan BPJS ) Pemerintahan Era Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2014 dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek politik di dalam kebijakan sosial pada pemerintahan yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Kebijakan sosial seperti BLT dan BPJS yang bertujuan untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dimanipulasi oleh pihak yang berkepentingan untuk menarik dukungan masyarakat yang menyebabkan meningkatnya keuntungan politik.

BLT merupakan bantuan berbentuk transfer uang tunai kepada masyarakat miskin sebagai bentuk kompensasi pemerintah dalam menanggapi kenaikan harga BBM yang dapat menimbulkan kurangnya daya beli masyarakat akibat naiknya harga bahan pokok. Terdapat pro kontra yang terjadi di dalam pelaksanaan BLT di masyarakat karena pelaksanaan BLT tersebut berdekatan dengan waktu pemilu dan adanya kepentingan pemerintahan SBY dalam memanfaatkan BLT sebagai alat untuk mendapatkan dukungan suara. Dalam penyaluran dana BLT pemerintah menggunakan data tahun 2005 (PSE05) yang sudah tidak

relevan karena adanya data pembaruan di tahun 2008 (PPLS08) karena adanya kepentingan politik dari pemerintah SBY yaitu data pada tahun 2005 jumlah penerima BLT lebih banyak dibandingkan tahun 2008. Penggunaan data penerima BLT dengan PSE05 tersebut dilakukan agar lumbung suara Partai Demokrat dan SBY tetap terjaga dalam menghadapi pemilu 2009.

Penolakan dan instruksi dari Megawati selaku ketua umum PDIP kepada kepala-kepala daerah dari PDPI untuk menolak program BLT menyebabkan turunnya popularitas SBY. *Timing* yang dilakukan oleh SBY dalam menanggapi penolakan-penolakan dan penurunan popularitas dalam pemilu 2009 sangat berpengaruh terhadap dukungan masyarakat. Respon Partai Demokrat dan SBY dalam menanggapi dan mengonter penolakan yang dilakukan Megawati dan kepala daerah dari PDIP sangat berpengaruh terhadap dukungan masyarakat terhadap Partai Demokrat dan SBY. Partai Demokrat dan SBY sudah memprediksi bahwa program BLT akan mendapatkan respon positif dari masyarakat yang dapat meningkatkan popularitas dan elektabilitas untuk menghadapi pemilu 2009 untuk menarik suara dari masyarakat. Keberhasilan program BLT dalam memobilisasi masyarakat untuk mendukung Partai Demokrat dan SBY dapat dilihat dari kemenangan Partai Demokrat sebagai partai baru yang menjadi partai pemenang di pemilu legislatif 2009.

Kebijakan sosial lainnya yang mempunyai aspek politik adalah BPJS yang merupakan penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia. BPJS sendiri

dibentuk atas dasar amanat UU no 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional atau SJSN yang mengamanatkan pembuatan Undang-Undang tentang BPJS maksimal 5 tahun setelah UU SJSN di undangkan. Tidak adanya usulan atau inisiatif dari DPR maupun pemerintah menyebabkan keterlambatan pembuatan UU BPJS sehingga terjadi banyak desakan-desakan dari masyarakat untuk membuat UU BPJS sehingga dimunculkan inisiatif dari DPR tentang pembuatan UU BPJS dan ditebentuknya UU nomor 24 tahun 2011.

Pelaksanaan BPJS yang baru diselenggarakan pada awal tahun 2014 dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Klaim dilakukan oleh pemerintah SBY terhadap BPJS sebagai program usulan pemerintah sehingga disebut sebagai SBY care menerima kritik dari DPR karena pada pembuatan dan pembahasan UU BPJS diperlambat oleh pihak pemerintah atau eksekutif yang tidak datang dalam pembahasan UU tersebut dan inisiatif tersebut merupakan usulan dari DPR bukan dari presiden. Klaim tersebut dapat membuat persepsi masyarakat bahwa SBY memiliki peranan besar dalam pembahasan dan penyelenggaraan BPJS. Pemanfaatan BPJS sebagai alat politik SBY dapat dilihat dari penyalahgunaan surat edaran BPJS tentang sosialisasi BPJS untuk Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang menekankan peran dari SBY dalam pembuatan BPJS dan penggunaan program BPJS sebagai alat kampanye SBY pada pemilu tahun 2014. SBY menggunakan BPJS sebagai alat untuk memobilisasi pemilih untuk mendukung pemilu 2014 karena mesin politik

Partai Demokrat pada saat itu sedang terguncang akibat masalah internal partai. Penggunaan kebijakan sosial sebagai alat politik yang terjadi sangat berpengaruh dengan *timing* politik untuk mendapatkan keuntungan politik secara maksimal yang dapat dilihat dari *timing* dan perilaku pemerintahan SBY dalam menggunakan kebijakan sosial yaitu BLT dan BPJS yang memperhatikan respons dan *timing* dalam menanggapi permasalahan yang ada dari kebijakan tersebut

#### 4.2 Saran

Diharapkan penelitian ini dapat membantu untuk penelitian selanjutnya tentang kebijakan sosial untuk meneliti tidak hanya dari sisi teknis saja melainkan dari politik untuk dapat mengetahui makna politik dan aspek politik di dalam sebuah kebijakan sosial yang filantropis. Serta mengetahui *timing* politik dan konsep pembelian suara melalui kebijakan sosial untuk mendapatkan keuntungan politik pemegang kepentingan